

**PROFESIONALLISME DAN KOMPETENSI MUTU GURU  
PADA PROSES PEMBELAJARAN TINGKAT SD, SMP, SMU DINAS  
PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT**

Karna

(Program Pascasarjana-Institut Agama Islam Tasikmalaya)

[karnahusni@iaitasik.ac.id](mailto:karnahusni@iaitasik.ac.id)

**Abstrak**

Profesionalisme dalam proses pembelajaran mestinya merupakan tuntutan yang harus dipenuhi bagi guru dalam mengajar. Kritik tersebut banyak dilontarkan oleh sebagian pihak, maka hal itu sesuatu yang wajar untuk disikapi secara arif dan bijaksana oleh pihak yang berkepentingan. Dimana konsep tentang guru profesional akan selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu peran guru sangatlah dituntut dalam menentukan usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Berarti guru yang merupakan agen pembelajaran harus mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam mendukung pembangunan pendidikan. Oleh karena itu guru perlu dikembangkan sebagai suatu profesi yang bermartabat, seperti apa yang diamanatkan dalam Permandinas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru tertanggal 4 Mei 2007. Dimana disana disebutkan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Dalam UU No. 14 tahun 2005, profesional bermakna pekerjaan atau kegiatan dari seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norm tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi (bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu); (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Permasalahan dan tantangan di era globalisasi menuntut peningkatan kualitas demokratisasi, transparansi, budaya mutu dan HAM. Perkembangan IMTAQ dan akselerasi IPTEK memerlukan SDM berkualitas yang mampu go internasional. Pasar bebas menuntut semua bangsa untuk mempersiapkan SDM berkualitas agar tidak tergantung kepada bangsa lain. SDM berkualitas dan mampu menghadapi persaingan internasional, hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan yang bermutu.

**Kata kunci :** profesionalisme; kompetensi; dinas pendidikan

**Abstract**

Professionalism in the learning process should be a demand that must be met for teachers in teaching. This criticism has been made by many parties, so it is something that is reasonable to be addressed wisely and prudently by interested parties. Where the concept of a professional teacher will always be associated with knowledge of educational insights and policies, learning and learning theory, educational research (classroom action), learning evaluation, educational leadership, classroom/school management, as well as information and communication technology. For this reason, the role of the teacher is highly demanded in determining efforts to improve the quality of formal education. This means that the teacher which is a learning agent must be able to carry out the learning process as well as possible, in supporting educational development. Therefore, teachers need to be developed as a dignified profession, as mandated in Permandinas No. 16 of 2007 concerning Academic Qualification Standards and Teacher Competency dated May 4 2007. Where it is stated that teacher competency standards are fully developed from the four main competencies, namely pedagogical, personality, social and professional competencies. In

Law no. 14 of 2005, professional means the work or activity of a person and is a source of income for life that requires expertise, skills or skills that meet certain quality standards or norms and requires professional education. Professionals are (1) concerned with professions (fields of work based on certain expertise education); (2) requires special intelligence to run it; (3) requires payment to do so. Problems and challenges in the era of globalization demand an increase in the quality of democratization, transparency, quality culture and human rights. The development of IMTAQ and the acceleration of science and technology require quality human resources who are able to go international. The free market requires all nations to prepare quality human resources so they are not dependent on other nations. Quality human resources capable of facing international competition is only possible through quality education.

**Keywords:** professionalism; competence; education office.

## **A. Pendahuluan**

Profesionalisme dalam proses pembelajaran mestinya merupakan tuntutan yang harus dipenuhi bagi guru dalam mengajar. Kritik tersebut banyak dilontarkan oleh sebagian pihak, maka hal itu sesuatu yang wajar untuk disikapi secara arif dan bijaksana oleh pihak yang berkepentingan. Dimana konsep tentang guru profesional akan selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu peran guru sangatlah dituntut dalam menentukan usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Berarti guru yang merupakan agen pembelajaran harus mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam mendukung pembangunan pendidikan. Oleh karena itu guru perlu dikembangkan sebagai suatu profesi yang bermartabat, seperti apa yang diamanatkan dalam Permandinas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru tertanggal 4 Mei 2007. Dimana disana disebutkan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.

Dalam UU No. 14 tahun 2005, profesional bermakna pekerjaan atau kegiatan dari seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norm tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi (bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan

keahlian tertentu); (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Program pelatihan guru adalah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru agar menjadi SDM pendidik yang terampil (skill labour) atau dengan istilah lain guru memiliki kompetensi. Upaya tersebut mestinya dirancang dengan sungguh-sungguh. Menurut Syaefudin dan Syamsuddin (2007 : 16) mengatakan bahwa: 'Pembangunan pendidikan memerlukan resources yang perlu diatur secermat mungkin, karena resources itu amat langka. Kesemuanya ini perlu dirancang secara komprehensif, akurat, cermat dan efisien serta berdasarkan perhitungan yang matang. Tanpa perencanaan yang sistematis dan rasional upaya pembangunan pendidikan ini mustahil dapat dilaksanakan dengan efektif.

Namun pada proses pelaksanaan program pelatihan guru, masih ada diantara kenyataannya bahwa hasil lulusannya banyak berkompeten di bawah standar. Hal itu bagaimana mungkin kompetensi guru yang telah dinyatakan lulus sesuai mengikuti pelatihan dapat melaksanakan tugas yang signifikan di tempat ia bertugas. Pertanyaan itu pastilah akan muncul, bagi siapa saja yang peduli terhadap kualitas pendidikan. Hasil kajian Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menyebut, sebanyak 40 % guru yang lulus sertifikasi memiliki standar nilai di bawah lima.

## **B. Kajian Teoritis**

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2008:3) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Memang secara langsung tidak ditemukan kata manajemen dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun prinsip-prinsip manajemen seperti yang dikemukakan G.R. Terry di atas juga dijelaskan dalam Islam. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dikerjakan secara baik, teratur dan benar, juga segala prosedur yang telah ditetapkan harus diikuti secara benar serta sesuatu kegiatan tidak bisa dikerjakan secara sembarangan.

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS Ash Shaff 4).

Ayat di atas dapat diartikan bahwa suatu kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama dan teratur akan lebih baik dibandingkan apabila dikerjakan secara sendiri-sendiri. Mengapa demikian, sebab suatu kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama boleh jadi dapat mengurangi kesalahan, sebab dengan kebersamaan bisa saling mengingatkan serta bekerjasama, sehingga segala sesuatu kesalahan bisa diminimalisir. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan akan terhindar dari kerugian, sebab apabila kegiatan mendapatkan kerugian maka pasti akan dirasakan bersama-sama. Sehingga diharapkan dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama akan lebih kokoh untuk tidak berbuat kesalahan.

Adapun prinsip utama yang diajarkan Islam tentang mengerjakan sesuatu, seperti yang disabdakan Rasulullah saw, sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya Allah senang jika seseorang di antara kamu mengerjakan suatu perbuatan lalu dia mengerjakannya secara sempurna” (HR. Thabrani).

Dari hadits di atas dapat berarti apabila suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang secara sempurna, secara tidak langsung ia harus mengerjakan secara teratur, sesuai dengan langkah target yang terkontrol, berarti apa yang dikerjakannya akan tertuntun rapi untuk mencapai tujuan. Pekerjaan yang demikian pantaslah dicintai oleh Allah. Prinsip-prinsip mengerjakan suatu pekerjaan secara teratur sesuai dengan target yang terkontrol ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen secara umum. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ya’la disebutkan sebagai berikut:

Undang-Undang dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal yang berkaitan dengan pendidikan disajikan pada pasal 31 yang menyatakan hak setiap warga negara akan pendidikan (pengajaran) dimana penyelenggaraannya diatur oleh undang-undang. Pasal ini

mengharuskan pemerintah untuk mengadakan satu sistem pendidikan nasional yang memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapat pendidikan

### **C. Metode**

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia, pendekatan ini secara khusus untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang interaksi sosial dan kepercayaan masyarakat. Adapun metode deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan di lapangan, melalui proses penyelidikan dengan penuturan, analisis pengamatan dan klarifikasi baik dari perorangan maupun kelompok. Metode ini sering disebut juga sebagai metode analitik.

Kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan yaitu orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pemakaian partisipan dalam penelitian kualitatif, yang dianggap sebagai instrumennya adalah orang atau human instrument, termasuk peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti membekali teori dan wawasan yang cukup, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti, sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.

Penggunaan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif ini ditempuh dikarenakan gejala-gejala, informasi, peristiwa, keterangan-keterangan dari hasil pengamatan selama berlangsungnya proses penelitian mengenai "Manajemen Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan", akan lebih tepat bila diungkap dalam bentuk kata-kata. Disamping itu, data yang didapat akan lebih mendalam dan lebih sebenarnya dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

### **D. Pembahasan**

Pendidikan pada kenyataannya tidak dapat menghindar dari berbagai pengaruh kehidupan bermasyarakat dan berbangsa baik pengaruh dibidang sosial, politik,

budaya, ekonomi, maupun hukum. Masyarakat seharusnya linier dalam mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang dicita-citakan. Secara empiris, sistem kehidupan masyarakat masih belum koheren, belum satu nafas dengan hakekat Sistem Pendidikan Nasional, seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Padahal implementasi pendidikan yang baik akan mampu membentuk kehidupan yang baik dalam segala bidang.

Pada satu sisi, mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan masih dihadapkan sejumlah kendala utama di bidang pendidikan Jawa Barat. Diantaranya: pendidik dan tenaga kependidikan banyak yang belum berkualifikasi, proses pembelajaranpun juga masih belum optimal. Indikatornya dapat dilihat dari fakta bahwa: Pertama, rendahnya tingkat kemandirian output pendidikan; Kedua, hasil belajar siswa di sekolah belum banyak diterapkan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari; Ketiga, hasil pendidikan belum bisa menciptakan pribadi yang utuh/paripurna (Bangsa Indonesia mempunyai visi dan misi yang jelas mengenai pendidikan seperti dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan-kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi sebagai upaya penjabaran dari UUD 1945); Keempat, dunia pendidikan belum banyak terkait dengan program pengembangan kebudayaan, lingkungan, kesehatan, olah raga dan lainnya.

Dengan kendala di bidang pendidikan di atas, salah satunya berakibat perkembangan kehidupan masyarakat yang masih ditandai oleh berbagai ketimpangan seperti: moral, akhlak, jati diri bangsa, sosial, keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan politik serta ekonomi. Apalagi ditambah dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam, dan kurang terciptanya lapangan pekerjaan, maka untuk memperoleh kesempatan penghidupan berkurang. Maka semakin rendah tingkat kehidupan yang layak secara umum pada tingkat lokal, nasional maupun persaingan pada tingkat global.

Dalam rangka menjawab tantangan di atas, maka BPPTKPU, BPPTKPK, BPPTKPLB yang merupakan lembaga pelatihan pemerintah di bawah Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat, mengemban amanat sebagai lembaga untuk

meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut. Untuk itu mengawali penelitian, peneliti menunjukkan profil lembaga masing-masing, yang dilanjutkan menunjukkan gambaran tentang bagaimana kegiatan manajemen pelatihan yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut. Permasalahan dan tantangan di era globalisasi menuntut peningkatan kualitas demokratisasi, transparansi, budaya mutu dan HAM. Perkembangan IMTAQ dan akselerasi IPTEK memerlukan SDM berkualitas yang mampu go internasional. Pasar bebas menuntut semua bangsa untuk mempersiapkan SDM berkualitas agar tidak tergantung kepada bangsa lain. SDM berkualitas dan mampu menghadapi persaingan internasional, hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan yang bermutu.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan di lapangan (sekolah) dalam penyelenggaraan peningkatan Mutu Pendidikan bagi anak didik (siswa), maka lahirlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTKPU). Tentunya memiliki konsekuensi logis untuk bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi: Guru, Kepala Sekolah, Tenaga Tata Usaha Sekolah, Pengelola Perpustakaan Sekolah, Pengawas Sekolah, Tutor, Komite Sekolah, Penilik Sekolah, dan lain sebagainya. Pendek kata, sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan perluasan maupun cakupan, sasaran sebagai konsekuensi dari nama barunya, sehingga Visi dan Misinya pun disesuaikan.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut menjadi semakin urgen, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 itu disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mengedepankan prinsip-prinsip

demokratis, transparan, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keragaman, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Prinsip itu mengandung pengertian bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya tanpa memandang status social, etnis dan gender di seluruh pelosok tanah air.

Program kegiatan BPPTKPU dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Yaitu yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, yang dikemas dalam 3 kelompok kegiatan yaitu : Kegiatan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan; Pemilihan pendidik, tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi, dan Kegiatan sertifikasi, kualifikasi, dan manajerial.

Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan BPPTKPK) secara fisik berdiri pada tahun 1975 dengan nama Pusat Latihan Pendidikan Teknik (PLPT). Tahun 1975 s.d 1978 PLTP di pimpin oleh Drs. M.Bakrie, MA.

Dari hasil dari pendampingan tersebut kemudian dianalisa oleh penyelenggara pelatihan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan apabila dijumpai berbagai kendala.

Namun pada kenyataan di lapangan, kegiatan ini susah dilaksanakan. menurut R.2, hal itu disebabkan oleh kendala yang paling utama adalah adanya keterbatasan dana dan personil balai yang berkompeten untuk melakukan pendampingan terhadap para lulusan pelatihan yang tersebar di wilayah kerja Jawa Barat yang cukup luas.

- 1) Hasil pengamatan peneliti, bahwa tidak melakukan proses pendampingan pasca pelatihan oleh kepala sekolah, atau pihak pengawas sekolah yang tidak aktif melakukan pendampingan. Padahal menurut otonomi daerah, pihak dinas kabupaten juga ikut bertanggungjawab terhadap

pengembangan profesionalisme berkelanjutan tenaga pendidik. Walau demikian ada upaya lain sebagai pengganti pendampingan menurut pendapat staf penyelenggara pelatihan R.11, pihak balai setiap akhir pelatihan kepada para peserta pelatihan menawarkan kerjasama sukarela untuk mengadakan kegiatan IHT dengan seluruh peralatan IHT disediakan oleh pihak BPPTKPK, hal ini sesuai wawancara dengan salah seorang guru peserta pelatihan R.23 yang pernah melakukan kegiatan IHT

- 2) Menurut R.18, dampak yang dirasakan dari hasil pelatihan kompetensi guru memang ada, namun tidak signifikan (kurang sesuai dengan tujuan pelatihan itu sendiri). Selain karena memang peserta pelatihan tidak berkompeten terhadap materi yang diberikan di tempat tugas juga penyebabnya karena tidak adanya pendampingan pasca pelatihan, apalagi peralatan praktek yang dimiliki oleh sekolah belum memadai.
- 3) Pengamatan peneliti terhadap lulusan pelatihan guru ditempat ia mengajar, ternyata hasil pelatihan kurang diterapkan sesuai apa yang diamati peneliti ditempat pelatihan. Hasil pengamatan peneliti ditempat pelatihan, ternyata dari pengamatan peneliti terhadap guru lulusan pelatihan kurang secara konsekuen menerapkan hasil pelatihan ditempat ia mengajar. Hal ini bila dikaitkan dengan hasil pengamatan peneliti ditempat pelatihan, disebabkan karena kurangnya pemahaman yang peserta peroleh ditempat pelatihan. Sehingga ia sulit menerapkannya di tempat ia bertugas. Sehingga bisa diduga hasil pelatihan kurang dirasakan oleh sekolah tempat peserta pelatihan bekerja.
- 4) BPPTKPK memiliki banyak sekali kelebihan dan kekuatan, berbagai peluang yang muncul selalu teramati dengan cermat oleh staf BPPTKPK. Semua pegawai BPPTKPK sangat memahami karakteristik dari liku-liku Pendidikan Kejuruan. Semua pegawai lembaga tersebut memahami sekali kelebihan dan kekuatan lembaga, yang semua itu secara sadar atau tidak disadari membangun kepekaan terhadap dunia pendidikan

### **Kesimpulan**

Kegiatan manajemen program pelatihan berbasis kompetensi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan belum efektif. Belum efektifnya tersebut disebabkan karena kualitas perencanaan sebagai proses awal desain pelatihan belum akurat, sehingga pengaruhnya pada pengelolaan kegiatan pelatihan seperti proses pelaksanaan, evaluasi penyelenggaraan pelatihan, serta pendampingan pasca pelatihan dilaksanakan dengan apa adanya. Dengan pengelolaan program pelatihan yang sedemikian menyebabkan tujuan penyelenggaraan program pelatihan belum mencapai target sesungguhnya. Sehingga akan berdampak secara langsung terhadap rendahnya mutu kinerja bagi para lulusan peserta pelatihan di lapangan, yang pada gilirannya mutu pendidikan juga sulit terangkat.

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian dan pembahasan pada bab IV adabeberapa simpulan yang bisa dibuat. Simpulan ini merupakan temuan jawaban dari tujuan dan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Identifikasi awal kebutuhan, sebagai bahan untuk membuat perencanaan belum dilaksanakan dengan baik, sehingga menjadi penyebab paling utama ketidakefektif proses pelatihan yang diselenggarakan oleh balai pelatihan,
2. Pelaksanaan pelatihan belum mengakomodir azas-azas strategi belajar dan mengajar terpadu sehingga menimbulkan kekuatiran bagi peserta.
3. Beberapa model evaluasi baik sebelum, selama proses, dan sesudah pelatihan belum dilaksanakan dengan baik oleh balai pelatihan. Balai pelatihan belum dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya yang belum terpenuhi. Sehingga balai pelatihan tidak mengetahui peluang yang belum dimanfaatkan, balai pelatihan kurang dapat menggunakan sumber informasi yang dapatdigunakan untuk mencapai program pelatihan, dan juga pihak balai belum dapat menaksir kekurangan dan kelebihan prosedur program pelatihan.
4. Balai pelatihan belum melaksanakan proses pendampingan pasca pelatihan terhadap para lulusan pelatihan guru di tempat para lulusan pelatihan melaksanakan tugas. Proses pendampingan secara terpadu tidak dilaksanakan,

balai pelatihan hilang kesempatan dapat melakukan pengecekan terhadap kompetensi guru yang telah mengikuti proses pelatihan.

5. Pelatihan guru yang sudah dilakukan oleh balai pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, belum memberikan dampak yang besar terhadap kebutuhan organisasi, kelompok kerja tempat peserta pelatihan bekerja, dan peserta pelatihan sendiri.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, ada beberapa implikasi yang bisa di gambarkan. Implikasi tersebut merupakan tindak lanjut atau akibat logis dari kesimpulan penelitian tersebut dan diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi lembaga pelatihan di lingkungan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Implikasi dari temuan penelitian tersebut adalah:

1. Jika perencanaan pelatihan tidak dilandasi oleh hasil identifikasi kebutuhan pelatihan yang lengkap, maka hasil pelatihan tersebut akan tidak dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, karena relevansi output dan dampak pelatihan yang sangat rendah. Maka dengan perencanaan pelatihan yang sedemikian, sulit rasanya program pelatihan guru mengakomodir kebutuhan di lapangan. Maka pelaksana pendidikan di lapangan sulit meningkatkan mutu pendidikan.

2. Jika implementasi pelaksanaan pelatihan tidak dilandasi oleh azas-azas strategi belajar-mengajar, serta tidak mempertimbangkan belajar dan mengajar orang dewasa. Sehingga para peserta pelatihan merasa kurang terakomodir kebutuhan, aspirasi dan potensinya, maka menyebabkan kurang antusiasnya dalam mengikuti proses pelaksanaan pelatihan. Akibatnya sudah dapat diduga bahwa materi pelatihan kurang dapat diserap dengan baik oleh para peserta pelatihan, maka hasil pelatihannya tidak akan mencapai target yang diharapkan dan produktivitas pelatihan tetap rendah. Yang pada gilirannya peningkatan mutu tidak akan tercapai

3. Jika evaluasi pelatihan hanya dilakukan pada awal dan akhir pelatihan dan hanya merespon terhadap penyelenggaraan pelatihan secara subjektif, maka fungsi evaluasi tersebut kurang dapat mencapai informasi dan hasil evaluasinya tidak bisa digunakan untuk perbaikan kualitas pelatihan pada masa berikutnya;

Sehingga dengan evaluasi pelatihan yang sedemikian, maka balai pelatihan tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan tidak mengetahui peluang yang belum dimanfaatkan, balai pelatihan kurang dapat menggunakan sumber yang dapat digunakan untuk mencapai program pelatihan, dan juga pihak balai belum dapat menaksir kekurangan dan kelebihan prosedur program pelatihan. Sehingga balai pelatihan kurang memiliki petunjuk untuk keberlangsungan proses pelatihan berbasis kompetensi guru berikutnya. Dengan keadaan yang sedemikian, maka boleh jadi program pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak balai pelatihan dalam pelaksanaan program pelatihan selanjutnya tidak memiliki konsep yang jelas. Sehingga dengan pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi yang sedemikian, selanjutnya tidak akan dapat meningkatkan mutu pendidikan

4. Jika hasil pelatihan tidak ditindaklanjuti melalui kegiatan pendampingan pasca pelatihan, maka tidak ada jaminan bahwa hasil pelatihan tersebut akan diimplementasikan dengan baik oleh peserta pelatihan. Sehingga para alumni pelatihan tidak mengetahui apakah kinerjanya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan atau tidak. Dalam keadaan yang sedemikian, maka para alumni tidak memiliki arah yang pasti bagaimana ia harus melaksanakan proses pembelajaran yang benar. Dengan demikian rasanya sulit bagi alumni pelatihan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

5. Jika dampak dari hasil pelatihan berbasis guru di lapangan kurang terlihat, maka sulit rasanya bagi balai pelatihan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelatihan selanjutnya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pada tahap pendampingan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hamid, M. (2008). *Pembelajaran Bahasa Arab: Metode, Strategi, Materi, Dan Media*. Malang: Uin-Malang Press.
- Abdul Majid, Abdul Aziz. (1961). *Al-Lughat Al-Arabiyah: Usuluha Al-Nafsiyyah Wa Turuq Tadrisiha*. Mesir: Dar Al-Ma'ruf.

- Al-Khuli, Muhammad Ali. (2010). *Strategi Pembelajaran Bahasa Arab*. Yogyakarta: Basan Publishing.
- Asrori, Muhammad. (2008). *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima.
- Asyrofi, Syamsudin. (1988). *Analisis Teks Book*. Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga.
- Djamarah, Dan Zain. (1996). *Startegi Belajar Mengajar*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Efendy, Ahmad Fuad. (2009). *Metodologi Pengajaran Bahasa Arab*. Malang: Miskat.
- Hermawan, Acep. (2011). *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ibrahim, Abd Alim.(1982). *Al-Muwajjah Al-Fanni Li Mudarrisi Al-Lughah Al-Arabiyyah*. Mesir: Dar Al-Ma'arif.
- Izaan, Ahmad. (2007). *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Bandung:Humaniora.
- Moleong, Lexy. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abu Bakar. (1980). *Metode Pengajaran Bahasa Arab*. Solo: Tiga Serangkai.
- Mulyana, Deddy. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muna, Wa. (2011). *Metode Pembelajaran Bahasa Arab*. Yogyakarta: Teras.
- Rosyidi, Abdul Wahab, Dan Ma'lumatul Ni'mah. (2005). *Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab*. Malang: UIN Maliki.
- Saidun, Fiddaroini. (2006). *Strategi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab*. Surabaya: Jauhar.
- Slameto.(2003). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuddin Ar & Damaianti, Vismaia S.(2007). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya.

Taufiqurrochman, H.R. (2008). *Leksikologi Bahasa Arab*. Malang: Uin Malang Press.

Tarigan, H.G. (1991). *Metodologi Pengajaran Bahasa*. Jakarta: Cv Rajawali.

Tarigan, Henry, Guntur. (1979). *Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.